

**TINDAKAN HUKUM KANTOR PELAYANAN PAJAK
ATAS PEMBUKAAN REKENING BANK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM RANGKA PENYITAAN HARTA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN**

(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

NANDA MARETA AJENG SAPUTRI

NPM. 0771010137

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

**UNIVERSITY OF “VETERAN” NATIONAL DEVELOPMENT OF EAST JAVA
FACULTY OF LAW**

Name of Student : Nanda Mareta Ajeng Saputri
NPM : 0771010137
Place, Date of Birth : Ngawi, March 27, 1989
Program of Study : Stratum 1 (S1)
Title of Minithesis :

**THE LEGAL ACT OF TAX SERVICE POINT UPON THE OPENING OF
INDIVIDUAL PERSON TAX PAYER BANK ACCOUNT IN THE
FRAMEWORK OF WEALTH SEIZURE IN BANK ACCORDING TO THE
ACTS NUMBER 10 OF 1998 ABOUT BANKING**

ABSTRACT

Tax have very important role for State. But, it is undeniable that the state frequently has difficulties to collect it due to the great numbers of tax payers who do not obedient in making the tax payments. The tax payers less aware of the important meaning of tax, in which they are often in delinquent tax until their tax debts become accumulated. Upon the tax debt conducted the pressing a claim if it have not been paid then conducted the seizures that one of those is made the freezing. In which, after the freezing it is made the account opening to know the balance amount of Tax Payer or Tax Bearer. While, the banking have the Bank Secret provision obligating the bank side to keep the information of depositors and their deposits secret.

The problems formulation in this last assignment writing were What is the legal act of Tax Service Point upon the opening of individual person tax payer bank account in the framework of wealth seizure in bank according to the Acts No. 10 of 1998 about Banking.

The research type used was the normative one using the research approach namely the Acts approach. Data used were the primary data by means direct interview with the related parties in this case was the Pratama *KPP* (Tax Service Point) of South Sidoarjo and the secondary data obtained from the literature data.

Result of this research was the legal act of the Tax Service Point upon the individual person tax payer bank account opening in the framework of wealth seizure according to the Acts No. 10 of 1998 about the Banking namely in the implementation of account opening in the favor of taxing is allowed to reveal the bank secret, that this case is in accordance with articles 40 and 41 of the Banking Acts.

Key Words: Seizure, Account opening, Bank secret

1. PENDAHULUAN

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) pada alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Sistem pemungutan pajak *Self Assessment* memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sistem ini juga membutuhkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas. Salah satu bentuk penegakan hukum tersebut adalah dalam bentuk pemeriksaan yaitu untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak, dan apabila diketahui bahwa wajib pajak masih kurang dalam membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Produk surat ketetapan pajak tersebut antara lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang menimbulkan kewajiban kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Apabila sampai dengan jatuh tempo wajib pajak tidak membayar kewajibannya tersebut

akan menimbulkan utang pajak yang harus dilakukan proses penagihan oleh aparat pajak.

Penyitaan ini dilakukan dengan pemblokiran rekening Penanggung Pajak dengan tujuan akhir, memindahbukukan saldo rekening tersebut ke kas negara untuk pembayaran pajak. Melalui mekanisme pemblokiran tersebut, hasil pencairan tunggakan pajak tergantung dari besar kecilnya saldo rekening yang diblokir.¹

Pemblokiran rekening bank penanggung pajak yang telah dilakukan, berlanjut ketahap pembukaan rekening yang kemudian dilakukan penyitaan harta kekayaan yang terdapat pada rekening tersebut. Penyitaan harta di bank merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam pencairan tunggakan utang pajak. Hal ini terlihat pada kasus penyitaan harta di bank oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan yang ditampilkan berikut ini.

Proses penyitaan harta kekayaan yang tersimpan pada bank, jelas harus mengikuti peraturan perbankan atau hukum perbankan yang berlaku di Indonesia. Yang salah satu adanya ketentuan yang mengatur rahasia bank, dimana bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya.

¹ Rusjdi, Muhammad. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta. Penerbit PT Indeks. 2007, h. 55

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

1. Definisi Dan Unsur Pajak

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H. berbunyi Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. “Dapat dipaksakan” mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang, dan sandera.²

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun unsur-unsur yang dapat disimpulkan dari definisi pajak tersebut adalah

a. a compulsory

² Toni Marshayrul. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. PT.Grasindo. 2005. h.2

merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan UU. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.

b. *Contribution*

Diartikan sebagai iuran, yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter.

c. *by individual or organizational*

iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perseorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.

d. *receive by the government*

iuran diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu Negara.

e. *for public purposes*

iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.³

2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara untuk kepentingan umum. Fungsi Pajak dapat berupa fungsi anggaran (*fungsi budgetair*) dan fungsi mengatur (*fungsi regulated*).⁴ Dimana penjelasannya sebagai berikut:

- a. Fungsi pendanaan (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ditunjukkan

³ Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Indonesia*. Bandung. Graha Ilmu. 2009. h. 23

⁴ Muhammad Djafar Saidi. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta. Rajawali Pers. 2007. h.33.

dengan masuknya Pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- b. Fungsi mengatur (*regulair*) yaitu fungsi pajak untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

4. Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak dalam pembahasan ini adalah Orang pribadi Pengusaha Tertentu, sedangkan Objek pajak yang terkait adalah Penghasilan dari usaha atau kegiatannya, dimana Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. PPh yang dikenakan tersebut adalah PPh pasal 25, yaitu disebutkan pada angka (7) huruf (c), bahwa

(7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak

bagi:

- a. Wajib Pajak baru;
- b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
- c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

4. Penanggung Pajak

Pengertian Penanggung pajak dalam UU PPSP pasal 1 angka 3 adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian wakil dalam UU KUP pasal 32 ayat (1) dan (2) adalah:

- (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
 - a. badan oleh pengurus;
 - b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
 - c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
 - d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;

- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. *Stelsel* Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 *stelsel* :

- a. *Stelsel* nyata (*riël stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. *Stelsel* nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)
- b. *Stelsel* anggapan (*fictieve stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak berjalan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar Selma tahun berjalan, tanpa harus menunggu

pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihan dapat diminta kembali.⁵

2. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas-asas pemungutan pajak ialah:

- a. Asas Menurut Falsafah Hukum artinya pajak dipungut berdasarkan hokum, yang berarti pemungutan pajak harus berdasarkan pada keadilan, selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Beberapa teori yang mendasari pembenaran atas pemungutan pajak yaitu :
 1. Teori Asuransi artinya pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
 2. Teori Kepentingan artinya pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh Negara atas harta kekayaannya.
 3. Teori Gaya Pikul artinya masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat.
 4. Teori Bakti disebut juga teori kewajiban mutlak, artinya pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada Negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara.

⁵ Sri,Valentina. *Perpajakan Indonesia* .Yogyakarta. AMP YKPN. 2002. h. 9

5. Teori Asas Daya Beli artinya pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitikberatkan pada fungsi pajak mengatur.
- b. Asas Yuridis artinya pemungutan pajak dilandasi oleh hukum pemungutan pajak Pasal 23 ayat (2) UUD'45.
- c. Asas Ekonomis artinya pemungutan pajak selalu diupayakan untuk tidak menghambat kegiatan ekonomi baik masyarakat secara individu maupun ekonomi secara keseluruhan.⁶

3. Sistem Pemungutan Pajak

Adapun system pemungutan pajak yaitu:

- a. *Official Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung/menentukan jumlah pajak terutang dan menagihkannya kepada Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak terutang ke KPP dan menyetorkan pembayaran sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara.
- c. *Withholding System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.⁷

6. Utang Pajak

Timbulnya utang pajak menurut ajaran formal karena adanya surat ketetapan pajak yang diterapkan oleh pemerintah karena menggunakan *official assessment system*. Sedangkan menurut ajaran material utang pajak timbul karena undang-undang yang berlaku atau penerapan *self assessment system* di Indonesia. Sedangkan pengertian Utang Pajak menurut Undang-undang

⁶ Ibid.h.8

⁷ Ibid, 9

Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP) Pasal 1 angka 8 adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

- a. Pembayaran,
- b. Kompensasi,
- c. Daluwarsa,
- d. Pembebasan dan penghapusan.⁸

7. Jurusita Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PPSP, yang dimaksud JurusitaPajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan danpenyanderaan. Jurusita pajak ini diangkat oleh pejabat, dimana menurut pasal 1 angka 5, yang dimaksud pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat danmemberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketikadan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, SuratPencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, PembatalanLelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang

⁸ Mardiasmo. *Perpajakan* .edisi revisi 2008. Yogyakarta. PT. Andi Offset. 2008. h. 8

diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Tugas dan kewenangan jurusita pajak adalah,

Tugas Jurusita pajak

1. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
2. memberitahukan Surat Paksa;
3. melaksanakan penyitaan; dan
4. melaksanakan penyanderaan.

Wewenang Jurusita Pajak

1. memasuki dan memeriksa ruangan termasuk membuka lemari, laci, atau tempat lain untuk menemukan objek sita.
2. meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemda setempat, BPN, Dirjen Perhubungan laut, PN, Bank, atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak.
3. menjalankan tugasnya di wilayah kerja Pejabat yg mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri/Kepala Daerah.

B. Penagihan Pajak

1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berdasarkan UU PPSP, yang dimaksud tindakan penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, dengan melakukan tindakan menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan Penyitaan, melaksanakan Penyanderaan, dan melakukan pelelangan. Adapun tujuan mendasar untuk melaksanakan penagihan adalah :

- Memastikan/meyakinkan bahwa keputusan yang belum dibayar tersebut adalah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- Dapat menagih pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Dasar Penagihan Pajak tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UU KUP yang berbunyi, “Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”.

Jatuh tempo ketetapan sebagai dasar penagihan tersebut diatas, menentukan kapan pelaksanaan penagihan dapat dan harus dimulai. Untuk

PPh, PPN, PPn BM, dan Bunga Penagihan, pada dasarnya jatuh tempo ditetapkan adalah satu bulan setelah tanggal terbit penetapan. Hal ini sesuai UU KUP Pasal 9 ayat (3) bahwa, “Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan”. Setelah jatuh tempo penetapan maka dilakukan Tindakan Penagihan Pajak. Adapun tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses pelaksanaannya, alasan dilakukannya tindakan penagihan tersebut, dan waktu pelaksanaannya disajikan dalam Tabel Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak berikut ini.

JENIS TINDAKAN	ALASAN PENERBITAN	WAKTU PELAKSANAAN
Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan.	Setelah 7 hari sejak saat jatuh Tempo pembayaran
Penerbitan Surat Paksa	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran

	diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	
Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Paksa	2x24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak
Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan Penyitaan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
Penjualan Barang Sitaan (Lelang)	Setelah pengumuman lelang ternyata Penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang

Tabel 2
Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak⁹

Apabila Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak,

⁹ Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Selatan

maka pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis sesuai UU PPSP Pasal 8 ayat (2). Namun, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus (selanjutnya disingkat PMK-24/2008) Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Jatuh tempo Surat Teguran ini adalah setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan, dimana hal ini tertera dalam Surat Teguran. Apabila Penanggung Pajak belum melunasi utang pajak setelah jatuh tempo Surat Teguran, maka dilakukan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak atas hutang pajak yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, setelah didahului dengan surat teguran, kantor pelayanan pajak akan menerbitkan Surat Paksa. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.¹⁰

Sifat dari Surat Paksa adalah eksekutorial sebanding dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bersifat eksekutorial artinya Surat Paksa dapat langsung dilaksanakan tanpa bantuan keputusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU PPSP yang berbunyi bahwa, “Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Pada pasal 7 ayat (2) UU PPSP, Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. Dasar penagihan;
- c. Besarnya utang pajak;
- d. Perintah membayar pajak.

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, sesuai Pasal 11 UU PPSP.

¹⁰ Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, *Pedoman Penagihan Pajak 2009*. Jakarta 2009. h. 20

2. Penyitaan

a. Pengertian dan tujuan Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 14 UU PPSP Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Pelaksanaan Penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi piutang dan biaya penagihan pajak.

b. Dasar Hukum Penyitaan

Dasar penyitaan terdapat pada UU PPSP Pasal 12 ayat (1) yaitu Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak setelah jatuh tempo Surat Paksa, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya, sebagaimana terdapat pada pasal 12 ayat (2) UU PPSP.

c. Waktu Pelaksanaan Penyitaan

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000

Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disingkat PP-135/2000) menyebutkan bahwa, “Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak”. Jangka waktu 24 jam tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa.

d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PPSP bahwa, “Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan”.

e. Barang Penanggung Pajak yang Dapat Disita

Menurut pasal 14 ayat (1) UU PPSP menyebutkan, “Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu, berupa:

a. Barang Bergerak

Termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau

b. Barang Tidak Bergerak

Termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

f. Pelaksanaan Penyitaan

Pelaksanaan Penyitaan menurut PP-153/2000 Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) adalah:

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus :
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenalan Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi

Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, berdasar Pasal 7 PP No.153/00.

g. Pencabutan Sita

Ketentuan tentang Pencabutan Sita , sebagaimana terdapat dalam PP-153/2000 Pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan (4) huruf a adalah :

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.
- (4) Pencabutan sita terhadap :
 - a. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang

dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan;

3. Lelang

Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi apabila melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai pasal 25 ayat (1) UU PPSP.

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Sedangkan pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang adalah :

1. Barang yang mudah rusak atau cepat rusak
2. Uang tunai
3. Deposito berjangka
4. Tabungan
5. Saldo rekening Koran
6. Obligasi
7. Saham

8. Surat berharga lainnya,
9. Piutang
10. Penyertaan modal pada perusahaan lain.

Berikut tabel cara pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak atas barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.

No.	BARANG YANG DISITA	CARA PEMBAYARAN	KETERANGAN
1.	Uang	Disetor ke kas Negara	
2.	Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu	Dipindahbukukan ke kas negara	Atas permintaan Pejabat kepada bank yang bersangkutan
3.	Obligasi, saham, surat berharga lain yang diperdagangkan di bursa efek	Di jual di bursa efek	Atas permintaan Pejabat
4.	Obligasi, saham, surat berharga lain yang tidak diperdagangkan di bursa efek	Di jual oleh Pejabat	
5.	Piutang	Dibuat berita acara persetujuan tentang	

		pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat	
6.	Penyertaan modal pada perusahaan lain	Dibuat akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat	

Tabel 3

***Cara Pembayaran Utang Pajak Dan Biaya Penagihan Pajak Atas Barang
Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang¹¹***

C. Tinjauan Umum tentang Rahasia Bank

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.10 tahun 1998 , yang dimaksud Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pengertian rahasia bank juga dapat ditemukan pada Pasal 36 Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, bahwasannya yang dimaksud Rahasia Bank adalah Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan

¹¹ Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Selatan

hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

Keadaan keuangan nasabahnya yang dimaksud adalah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos-pos passive dan segala pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.¹²

1. Teori-teori mengenai Rahasia Bank

Teori-teori mengenai rahasia bank terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak

Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga, dalam keadaan biasa ataupun keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan Negara dan masyarakat sering terabaikan.

b. Teori Rahasia Bank yang bersifat Relatif

Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau member keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang

¹² Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. Bandung. Mandar Maju. 2000. h. 37

mendesak, misalnya untuk kepentingan Negara atau kepentingan hukum.¹³

D. Pengertian Tindakan Hukum

Tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum itu dapat berupa :

- 1) Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban dan kewenangan yang ada;
- 2) Jika menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada;
- 3) Jika terdapat hal-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.¹⁴

Pengertian hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan atau rintangan. Sehingga dapat diartikan bahwa hambatan merupakan halangan dalam melakukan sesuatu, yang mana dengan halangan tersebut maka tidak tercapai tujuan.

¹³ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Prenada Media Group. 2006. h.120

¹⁴ <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05/tindakan-pemerintahan-dalam-negara.html>, 24 November 2010/12.28